

## Lampiran 1

### Item Pengungkapan Wajib LKPD berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP
<b>PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan</b>	
1.	Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2.	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3.	Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
<b>PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Investasi</b>	
4.	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
5.	Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
6.	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
7.	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
8.	Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
9.	Perubahan pos investasi;
<b>PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Aset Tetap</b>	
10.	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat ( <i>carrying amount</i> );
11.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perolehan nilai jika ada, mutasi aset tetap lainnya);
12.	Informasi penyusutan, meliputi (nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode);
13.	Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP
14.	Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
15.	Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
16.	Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
	Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
17.	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
18.	Tanggal efektif penilaian kembali;
19.	Jika ada, nama penilai independen;
20.	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
<b>PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	
21.	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
22.	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
23.	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
24.	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
25.	Uang muka kerja yang diberikan;
26.	Retensi;
<b>PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Kewajiban</b>	
27.	Daftar skedul utang;
28.	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
29.	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
30.	Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
31.	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP
32.	Perjanjian restrukturisasi utang, meliputi (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan);
33.	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
34.	Biaya pinjaman, meliputi (perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan).

*Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*

## Lampiran 2

### Rincian Hasil Penelitian Terdahulu

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Peneliti: Amirrudin Zul Hilmi dan Dwi Martani</p> <p>Tahun: 2010</p>	<p>a. Tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi masih rendah. Tetapi tren tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terus meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Rata-rata tingkat pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan selama tahun 2006-2009 adalah 44,56%.</p> <p>b. Dalam kategori kompleksitas pemerintahan, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LK Pemerintah Provinsi.</p> <p>c. Dalam kategori pemeriksaan BPK RI, jumlah temuan audit BPK RI berhubungan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan.</p> <p>d. Variabel tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LK pemerintah provinsi.</p>
2	<p>Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik, Organisasi Dan Hasil Audit BPK</p>	<p>a. Tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2011 masih cukup rendah, yaitu 60,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian/lembaga belum menyajikan</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Peneliti: Imam Arifin dan Debby Fitriasari</p> <p>Tahun: 2014</p>	<p>seluruh informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan.</p> <p>b. Total aset secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.</p> <p>c. Jumlah satuan kerja secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.</p> <p>d. Dengan menggunakan variabel <i>dummy</i> dapat disimpulkan bahwa kementerian memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga negara. Hal ini dapat terjadi karena kementerian memiliki lebih banyak pegawai yang ahli dalam bidang akuntansi jika disbanding dengan lembaga.</p> <p>e. Untuk kedua variabel hasil audit (jumlah temuan dan tingkat penyimpangan) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga.</p>
3	<p>Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan</p>	<p>a. Tingkat pengungkapan wajib LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2008-2009 mengalami peningkatan, dari 51,24% pada tahun 2008 menjadi 52,91% pada tahun 2009.</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Peneliti: Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri</p> <p>Tahun: 2012</p>	<p>b. Variabel ukuran legislatif memiliki hubungan positif dan signifikan yang marginal. Artinya semakin banyak jumlah anggota DPRD, maka akan mendorong pemda untuk meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>c. Variabel umur administratif pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan.</p> <p>d. Variabel kekayaan pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan marginal terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya, semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki pemda, maka semakin memberikan tekanan kepada pemda untuk melakukan pengungkapan secara lengkap.</p> <p>e. Variabel <i>intergovernmental revenue</i> memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan.</p> <p>f. Variabel ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya, ukuran pemda yang semakin besar tidak mendorong pemda untuk semakin meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD.</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>g. Diferensiasi fungsional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>h. Variabel spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>i. Variabel rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LK pemda Kabupaten/Kota.</p>
4	<p>Determinan Kepatuhan pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat)</p> <p>Peneliti: Mira Feriyanti, Hermanto, Ni Ketut Suransi</p> <p>Tahun: 2015</p>	<p>a. Pengungkapan yang dilakukan pemda menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2011 ke 2013. Pada tahun 2011 tingkat pengungkapan LKPD hanya 55%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2012 dan 68% pada tahun 2013. Adanya peningkatan dalam pengungkapan LKPD, menunjukkan bahwa pemda terus memperbaiki kualitas laporan keuangannya.</p> <p>b. Variabel umur administratif pemda memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKP.</p> <p>c. Variabel kekayaan pemda memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Variabel tingkat ketergantungan pemda memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> <li>e. Variabel ukuran legislatif memiliki hubungan negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> <li>f. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> <li>g. Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> <li>h. Variabel jumlah temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> <li>i. Variabel tingkat penyimpangan audit BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</li> </ul>
5	<p>Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.</p> <p>Peneliti: Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rata-rata tingkat pengungkapan dalam CaLK selama tahun 2012-2014 adalah 41,7663%.</li> <li>b. Variabel tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.</li> <li>c. Variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.</li> </ul>



No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	Tahun: 2015	<p>d. Variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.</p> <p>e. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.</p> <p>f. Variabel temuan audit BPK RI tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.</p>
6	<p>Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Bali Tahun 2010-2013)</p> <p>Peneliti: Kadek Aris Dwi Pratama, Desak</p>	<p>a. Variabel kompleksitas pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam LKPD.</p> <p>b. Variabel ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>c. Variabel kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Nyoman Sri Werastuti dan Edy Surjana</p> <p>Tahun: 2015</p>	<p>d. Variabel belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>
7	<p>Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Peneliti: Lilis Setyowati</p> <p>Tahun: 2016</p>	<p>a. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD di Indonesia adalah 64%.</p> <p>b. Variabel kepemilikan aset oleh pemda berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>c. Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>d. Variabel diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>e. Variabel debt pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>f. Variabel <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p> <p>g. Variabel pembangunan masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.</p>
8	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib</p>	<p>a. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib dalam neraca pemda adalah 30,85%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)</p> <p>Peneliti: Djoko Suhardjanto dan Rena Rukmita Yulianingtyas</p> <p>Tahun: 2011</p>	<p>pengungkapan wajib pemda di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemda belum taat terhadap SAP.</p> <p>b. Variabel ukuran daerah (<i>size</i>) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib LKPD.</p> <p>c. Jumlah SKPD tidak mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib LKPD.</p> <p>d. Variabel status daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemda.</p> <p>e. Variabel kontrol berupa lokasi daerah bukan merupakan prediktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemda.</p> <p>f. Variabel jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi pemda.</p>
9	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia</p>	<p>a. Praktik pengungkapan wajib LKPD berdasarkan SAP di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sebesar 22%.</p> <p>b. Variabel umur pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia.</p>

No	Karakteristik Penelitian	Hasil Penelitian
	Peneliti: Djoko Suhardjanto dan Sigit Indra Lesmana  Tahun: 2010	c. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. d. Variabel ukuran pemda, kewajiban, pendapatan transfer dan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD di Indonesia.
10	<i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia  Peneliti: Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya  Tahun: 2016	a. Variabel kompetisi politik berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda. b. Variabel ukuran pemda berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda. c. Variabel rasio pembayaran utang berpengaruh positif terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda. d. Variabel kekayaan pemda tidak berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda. e. Variabel tipe pemda berpengaruh negatif terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda. f. Variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap peningkatan pengungkapan LK pada situs pemda.

### Lampiran 3

#### Rincian Opini Audit dan Temuan Audit BPK RI atas LKPD Provinsi Tahun Pelaporan 2012-2014 (Berdasarkan pada Sampel Penelitian)

##### Tahun Pelaporan 2012

No.	Pemerintah Provinsi	Temuan Audit				
		Opini Audit	Jumlah Temuan			
			LHP LK	LHP SPI	LHP UU	TOTAL
1	ACEH	WDP	7	10	10	27
2	NTT	WDP	8	4	4	16
3	SUMUT	WDP	4	6	16	26
4	SUMBAR	WTP		5	3	8
5	JAMBI	WTP		16	11	27
6	SUMSEL	WDP		8	16	24
7	BENGKULU	WTP		9	7	16
8	LAMPUNG	WTP		14	6	20
9	BABEL	WDP		7	15	22
10	KEPRIAU	WTP		4	11	15
11	JAKARTA	WTP		5	8	13
12	JABAR	WTP		4	4	8
13	JATENG	WTP		11	2	13
14	DIY	WTP		5	7	12
15	JATIM	WTP		3	5	8
16	BANTEN	WDP	3	10	11	24
17	BALI	WDP	2	4	4	10
18	NTB	WTP		2	3	5
19	KALBAR	WTP		4	4	8
20	SULUT	WTP		26	27	53
21	SULTENG	WTP		4	7	11
22	SULSEL	WTP		11	15	26
23	SULTRA	WDP	3	10	8	21
24	GORONTALO	WDP	1	10	12	23
25	SULBAR	WDP	4	9	12	25
26	KALSEL	WDP	2	3	3	8
27	KALTIM	WTP		14	18	32

**Tahun Pelaporan 2013**

No.	Pemerintah Provinsi	Temuan Audit				
		Opini Audit	Jumlah Temuan			
			LHP LK	LHP SPI	LHP UU	TOTAL
1	ACEH	WDP	11	12	7	30
2	NTT	WDP	7	5	4	16
3	PAPUA	WDP	3	7	14	24
4	PAPUABAR	WDP	2	7	7	16
5	SUMUT	WDP	4	6	9	19
6	SUMBAR	WTP		6	4	10
7	RIAU	WTP		5	9	14
8	JAMBI	WTP		9	10	19
9	SUMSEL	WDP		11	12	23
10	BENGGULU	WTP		8	7	15
11	LAMPUNG	WDP		10	11	21
12	BABEL	WDP		8	19	27
13	KEPRIAU	WTP		10	3	13
14	JAKARTA	WDP	2	15	10	27
15	JABAR	WTP		13	10	23
16	JATENG	WTP		13	8	21
17	DIY	WTP		7	9	16
18	JATIM	WTP		3	6	9
19	BALI	WTP	5	4	5	14
20	NTB	WTP		2	4	6
21	KALBAR	WTP		4	4	8
22	SULUT	WDP	4	28	22	54
23	SULTENG	WDP	3	4	8	15
24	SULSEL	WTP		11	10	21
25	SULTRA	WTP		13	4	17
26	GORONTALO	WTP		8	4	12
27	SULBAR	WDP		14	13	27
28	KALSEL	WTP		3	3	6
29	KALTIM	WDP	2	8	11	21

**Tahun Pelaporan 2014**

No.	Pemerintah Provinsi	Temuan Audit				
		Opini Audit	Jumlah temuan			
			LHP LK	LHP SPI	LHP UU	TOTAL
1	ACEH	WDP	6	11	7	24
2	NTT	WDP	2	6	5	13
3	MALUT	WDP	3	6	9	18
4	PAPUA	WTP		12	13	25
5	PAPUABAR	WTP		5	3	8
6	SUMUT	WTP		11	9	20
7	SUMBAR	WTP		6	3	9
8	RIAU	WTP		25	24	49
9	JAMBI	WTP		10	9	19
10	SUMSEL	WTP		10	13	23
11	BENGGULU	WTP		6	9	15
12	LAMPUNG	WTP		13	7	20
13	BABEL	WDP	2	8	7	17
14	KEPRIAU	WTP		5	6	11
15	JAKARTA	WDP	4	10	12	26
16	JABAR	WTP		13	10	23
17	JATENG	WTP		13	20	33
18	DIY	WTP		6	4	10
19	JATIM	WDP	1	7	8	16
20	BALI	WTP		4	5	9
21	NTB	WTP		2	2	4
22	KALBAR	WTP		4	3	7
23	KALTENG	WTP		3	3	6
24	SULUT	WTP		8	19	27
25	SULTENG	WTP		4	7	11
26	SULSEL	WTP		7	8	15
27	SULTRA	WTP		6	5	11
28	GORONTALO	WTP		5	4	9
29	SULBAR	WTP		4	4	8
30	KALSEL	WTP		2	2	4
31	MALUKU	WDP	1	8	8	17
32	KALTIM	WTP		4	6	10

**Lampiran 4**  
**Input Data**

**Data 6 Variabel Penelitian pada Tahun Pelaporan 2012**

KODE	PEMERINTAH PROVINSI	PAD	KEKAYAAN (Natural log PAD)	ASET	UKURAN (Natural log Aset)	PEND TRANSFER	KEWAJIBAN
1	ACEH	901.720.376.620,63	27,52757	18.970.445.536.273,60	30,57390	8.278.422.671.817,00	76.238.763.559,92
2	NTT	58.793.895.486,00	24,79730	5.332.223.141.144,73	29,30479	1.782.260.069.750,00	35.745.773.693,00
6	SUMUT	40.507.639.033,38	24,42476	13.159.670.199.593,50	30,20818	3.124.155.248.813,00	1.398.571.280.253,24
7	SUMBAR	1.225.490.641.909,33	27,83436	8.076.966.842.723,80	29,72004	1.144.630.852.485,00	9.970.198.176,88
9	JAMBI	995.202.289.115,94	27,62621	6.566.775.569.652,41	29,51304	1.665.586.782.809,23	95.232.868.752,00
10	SUMSEL	2.001.714.583.551,61	28,32503	15.951.939.312.821,10	30,40060	3.156.573.700.801,00	480.883.012.267,91
11	BENGKULU	483.768.274.997,19	26,90487	2.766.844.290.383,17	28,64873	1.076.080.065.252,00	58.649.698.279,85
12	LAMPUNG	1.666.717.331.753,00	28,14188	6.266.426.638.401,77	29,46623	1.280.851.521.963,00	290.340.587.523,75
13	BABEL	438.373.572.678,64	26,80634	3.224.723.942.769,18	28,80187	821.499.996.517,00	86.352.620,64
14	KEPRIAU	723.053.960.334,89	27,30675	4.042.927.109.308,85	29,02799	1.750.357.649.004,00	59.858.220.246,00
15	JAKARTA	22.040.801.447.924,00	30,72392	387.303.033.097.835,00	33,59023	13.334.647.270.804,00	903.875.313.321,00
16	JABAR	9.982.917.414.759,00	29,93190	22.394.435.744.766,10	30,73983	6.863.258.808.332,00	595.270.587.341,88
17	JATENG	6.629.308.010.656,00	29,52252	16.479.785.366.976,00	30,43316	5.029.375.234.223,00	253.580.621.566,00
18	DIY	1.004.063.125.812,33	27,63508	5.781.079.490.878,14	29,38561	1.161.102.204.851,00	6.291.413.360,51
19	JATIM	9.584.081.971.227,10	29,89112	34.828.834.579.758,10	31,18147	5.783.171.459.331,00	527.860.886.755,62
20	BANTEN	3.395.883.043.919,00	28,85358	8.982.010.258.760,04	29,82624	2.013.533.492.897,00	92.031.033.129,00
21	BALI	2.042.091.095.774,66	28,34500	5.412.315.638.738,88	29,31970	1.468.030.249.842,48	129.654.112.860,61
22	NTB	745.979.866.410,64	27,33796	5.178.190.837.523,88	29,27548	1.494.737.293.114,00	272.159.806.864,28
23	KALBAR	1.164.425.411.547,34	27,78325	3.892.857.439.426,82	28,99016	1.249.834.006.483,00	8.163.155.861,27
25	SULUT	633.650.532.712,00	27,17476	2.993.734.669.771,65	28,72754	1.200.756.538.930,00	65.175.051.808,20
26	SULTENG	605.821.437.425,82	27,12985	4.490.704.628.217,48	29,13303	1.351.431.258.326,00	18.122.382.340,00
27	SULSEL	2.198.776.396.284,65	28,41892	11.095.707.573.003,10	30,03758	2.233.545.228.166,00	233.442.971.841,61
28	SULTRA	439.184.485.917,41	26,80819	4.043.961.839.881,09	29,02825	1.308.767.073.981,00	320.638.969.441,12
29	GORONTALO	180.039.376.122,83	25,91644	1.559.347.991.357,39	28,07529	753.130.559.335,00	17.426.427.798,00
30	SULBAR	140.396.939.510,00	25,66774	1.196.206.415.931,47	27,81018	818.632.629.183,00	15.233.813.841,00
31	KALSEL	2.476.159.926.154,70	28,53773	9.840.615.802.778,43	29,91754	1.845.462.593.392,00	333.267.683.451,00
33	KALTIM	5.409.449.386.546,35	29,31917	25.338.363.497.813,60	30,86334	6.089.860.849.779,00	570.419.459.464,15



KODE	PEMERINTAH PROVINSI	Pend transfer + tot kewajiban	KEMANDIRIA N {PAD/(Pend transfer + tot kewajiban)}	DANA PERIMBANGAN	TOT PENDAPATAN	INTERGOVERN MENTAL (Dana perimbangan/Tot pendapatan)	Temuan Audit BPK RI	TOTAL PENGUNGA PAN (X)	RASIO PENGUNGKAPAN (X/34*100)
1	ACEH	8.354.661.435.376,92	0,10793	2.359.784.326.817,00	9.180.143.048.437,63	0,25705	27	23	0,67647
2	NTT	1.818.005.843.443,00	0,03234	1.098.995.074.750,00	2.241.053.965.236,00	0,49039	16	17	0,50000
6	SUMUT	4.522.726.529.066,24	0,00896	1.605.181.559.563,00	7.200.498.304.672,00	0,22293	26	18	0,52941
7	SUMBAR	1.154.601.050.661,88	1,06140	1.143.895.852.485,00	2.922.606.759.394,33	0,39140	8	18	0,52941
9	JAMBI	1.760.819.651.561,23	0,56519	1.341.202.292.809,23	2.662.697.133.695,17	0,50370	27	14	0,41176
10	SUMSEL	3.637.456.713.068,91	0,55031	2.378.798.650.801,00	5.223.940.074.318,61	0,45536	24	15	0,44118
11	BENGKULU	1.134.729.763.531,85	0,42633	882.996.672.752,00	1.562.525.395.259,19	0,56511	16	19	0,55882
12	LAMPUNG	1.571.192.109.486,75	1,06080	1.280.851.521.963,00	3.721.020.415.490,00	0,34422	20	20	0,58824
13	BABEL	821.586.349.137,64	0,53357	821.499.996.517,00	1.384.937.385.356,64	0,59317	22	22	0,64706
14	KEPRIAU	1.810.215.869.250,00	0,39943	1.594.446.909.004,00	2.473.411.609.338,89	0,64463	15	14	0,41176
15	JAKARTA	14.238.522.584.125,00	1,54797	2.832.746.608.832,00	16.878.128.994.991,00	0,16784	13	19	0,55882
16	JABAR	7.458.529.395.673,88	1,33846	2.832.746.608.832,00	16.878.128.994.991,00	0,16784	8	16	0,47059
17	JATENG	5.282.955.855.789,00	1,25485	2.318.806.099.223,00	11.694.479.699.467,00	0,19828	13	19	0,55882
18	DIY	1.167.393.618.211,51	0,86009	894.544.324.851,00	2.171.734.307.663,33	0,41190	12	17	0,50000
19	JATIM	6.311.032.346.086,62	1,51862	3.069.016.101.831,00	15.401.493.951.238,10	0,19927	8	17	0,50000
20	BANTEN	2.105.564.526.026,00	1,61281	1.015.105.167.897,00	5.413.705.183.626,00	0,18751	24	14	0,41176
21	BALI	1.597.684.362.703,09	1,27816	908.371.147.269,00	3.633.133.585.206,04	0,25002	10	13	0,38235
22	NTB	1.766.897.099.978,28	0,42220	1.054.470.183.114,00	2.242.817.184.524,64	0,47015	5	17	0,50000
23	KALBAR	1.257.997.162.344,27	0,92562	1.249.834.006.483,00	2.932.912.819.123,34	0,42614	8	16	0,47059
25	SULUT	1.265.931.590.738,20	0,50054	933.366.697.430,00	1.834.908.287.642,00	0,50867	53	19	0,55882
26	SULTENG	1.369.553.640.666,00	0,44235	1.042.926.565.326,00	1.962.393.166.941,82	0,53146	11	16	0,47059
27	SULSEL	2.466.988.200.007,61	0,89128	1.349.192.580.666,00	4.433.963.019.650,65	0,30429	26	19	0,55882
28	SULTRA	1.629.406.043.422,12	0,26954	1.019.750.146.481,00	1.811.984.327.624,41	0,56278	21	18	0,52941
29	GORONTALO	770.556.987.133,00	0,23365	637.007.089.335,00	933.169.935.457,83	0,68263	23	13	0,38235
30	SULBAR	833.866.443.024,00	0,16837	671.146.617.683,00	959.029.568.693,00	0,69982	25	11	0,32353
31	KALSEL	2.178.730.276.843,00	1,13652	1.534.463.778.392,00	4.340.251.839.472,50	0,35354	8	16	0,47059
33	KALTIM	6.660.280.309.243,15	0,81220	6.071.586.085.779,00	11.904.245.269.325,30	0,51004	32	17	0,50000

**Data 6 Variabel Penelitian pada Tahun Pelaporan 2013**

KODE	PEMERINTAH PROVINSI	PAD	KEKAYAAN (Natural log PAD)	ASET	UKURAN (Natural log Aset)	PEND TRANSFER	KEWAJIBAN
1	ACEH	1.325.435.091.289,19	27,91276	20.128.519.964.572,00	30,63316	9.330.839.235.109,00	131.748.278.711,98
2	NTT	523.201.203.067,00	26,98323	5.708.282.318.594,66	29,37294	1.858.794.817.793,00	66.504.864.817,00
4	PAPUA	633.726.316.291,00	27,17488	16.998.626.993.863,00	30,46415	7.438.399.305.954,00	13.556.812.066,00
5	PAPUABAR	236.282.889.480,20	26,18830	8.345.973.275.335,45	29,75280	5.401.413.744.294,00	146.444.762.512,60
6	SUMUT	4.091.285.888.816,07	29,03988	14.583.981.924.092,70	30,31094	3.251.985.640.111,00	2.291.569.817.963,18
7	SUMBAR	1.366.178.102.012,90	27,94304	8.780.154.849.626,51	29,80352	1.772.734.482.475,00	28.148.830.543,15
8	RIAU	2.725.623.913.109,06	28,63372	26.156.053.240.330,40	30,89510	4.246.402.191.445,00	1.294.269.895.888,34
9	JAMBI	1.063.879.903.502,10	27,69294	7.453.302.500.027,36	29,63968	1.814.055.309.316,00	128.539.240.220,29
10	SUMSEL	2.021.696.787.275,10	28,33496	18.257.096.675.399,00	30,53557	3.425.922.978.992,00	990.126.571.074,66
11	BENGKULU	525.207.934.928,81	26,98706	2.919.955.605.099,95	28,70259	1.169.072.811.483,00	64.162.789.383,44
12	LAMPUNG	1.771.297.934.878,73	28,20273	6.979.456.466.835,18	29,57399	1.384.043.537.032,00	604.995.103.591,50
13	BABEL	495.786.504.873,15	26,92941	3.981.917.411.995,45	29,01278	1.033.194.475.596,00	15.111.033.385,66
14	KEPRIAU	2.725.623.913.109,06	28,63372	26.156.053.240.330,40	30,89510	4.246.402.191.445,00	1.294.269.895.888,34
15	JAKARTA	26.852.192.452.636,00	30,92137	405.660.082.519.504,00	33,63654	11.517.024.305.153,00	1.086.634.987.381,00
16	JABAR	12.360.109.870.372,00	30,14550	25.506.958.756.384,00	30,86997	6.857.409.338.172,00	581.809.949.633,21
17	JATENG	8.212.800.640.888,00	29,73672	23.688.246.919.958,30	30,79600	5.104.915.622.408,00	226.765.826.390,00
18	DIY	1.216.102.749.617,01	27,82667	6.313.759.966.766,44	29,47375	1.356.662.127.537,00	2.750.592.428,86
19	JATIM	11.579.340.719.021,90	30,08024	36.937.172.461.921,00	31,24024	5.753.699.644.895,00	915.512.443.753,31
21	BALI	2.529.976.146.703,70	28,55923	6.086.194.157.847,93	29,43704	1.553.986.945.096,39	229.163.490.849,47
22	NTB	858.154.094.987,46	27,47805	11.163.037.036.079,90	30,04363	1.517.450.684.599,00	157.051.754.367,96
23	KALBAR	1.347.396.423.743,14	27,92920	4.848.176.723.254,76	29,20962	1.908.814.201.156,00	106.726.856.629,30
25	SULUT	790.273.619.619,00	27,39565	3.462.300.498.830,08	28,87295	1.271.809.467.404,00	68.458.638.807,97
26	SULTENG	662.226.615.649,50	27,21887	4.820.504.494.260,52	29,20390	1.466.151.032.883,00	38.688.074.452,60
27	SULSEL	2.560.045.632.511,80	28,57105	11.353.069.846.268,50	30,06051	2.297.580.755.100,00	498.688.656.149,21
28	SULTRA	514.857.031.059,95	26,96716	6.826.314.825.746,09	29,55181	1.451.899.059.568,00	373.676.737.290,87
29	GORONTALO	214.614.527.481,13	26,09211	1.811.889.663.728,55	28,22539	837.487.528.898,00	17.508.308.190,27
30	SULBAR	154.131.860.472,00	25,76107	1.150.698.776.041,39	27,77139	919.606.771.166,00	43.425.398.069,00
31	KALSEL	2.502.279.216.337,25	28,54822	10.280.018.544.024,80	29,96122	1.812.350.440.203,00	328.313.095.079,95
33	KALTIM	5.885.262.003.582,88	29,40347	27.644.918.991.480,20	30,95046	5.335.759.149.747,00	632.278.528.956,51

KODE	PEMERINTAH PROVINSI	Pend transfer + tot kewajiban	KEMANDIRIAN {PAD/(Pend transfer + tot kewajiban)}	DANA PERIMBANGAN	TOT PENDAPATAN	INTERGOVERNME NTAL (Dana perimbangan/Tot pendapatan)	Temuan Audit BPK RI	TOTAL PENGUNGKAPA N	RASIO PENGUNGKAPA N (X/34*100)
1	ACEH	9.462.587.513.820,98	0,14007	2.675.448.212.109,00	10.671.826.520.445,10	0,25070	30	20	0,58824
2	NTT	1.925.299.682.610,00	0,27175	1.165.848.622.793,00	2.387.439.508.423,00	0,48833	16	17	0,50000
4	PAPUA	7.451.956.118.020,00	0,08504	2.511.020.685.954,00	8.397.158.332.245,00	0,29903	24	17	0,50000
5	PAPUABAR	5.547.858.506.806,60	0,04259	2.992.755.350.294,00	5.637.696.633.774,20	0,53085	16	12	0,35294
6	SUMUT	5.543.555.458.074,18	0,73803	1.710.602.555.611,00	7.397.986.773.339,07	0,23123	19	18	0,52941
7	SUMBAR	1.800.883.313.018,15	0,75862	1.240.879.867.358,00	3.147.840.359.247,90	0,39420	10	13	0,38235
8	RIAU	5.540.672.087.333,34	0,49193	3.610.182.229.607,00	6.994.646.204.554,06	0,51614	14	24	0,70588
9	JAMBI	1.942.594.549.536,29	0,54766	1.487.559.863.316,00	2.886.262.906.136,10	0,51539	19	16	0,47059
10	SUMSEL	4.416.049.550.066,66	0,45781	2.649.216.454.338,00	5.468.139.691.033,10	0,48448	23	17	0,50000
11	BENGGKULU	1.233.235.600.866,44	0,42588	977.347.953.983,00	1.696.369.921.111,81	0,57614	15	19	0,55882
12	LAMPUNG	1.989.038.640.623,50	0,89053	1.384.043.537.032,00	3.901.950.613.831,73	0,35471	21	15	0,44118
13	BABEL	1.048.305.508.981,66	0,47294	907.835.915.596,00	1.529.110.292.281,15	0,59370	27	21	0,61765
14	KEPRIAU	5.540.672.087.333,34	0,49193	3.610.182.229.607,00	6.994.646.204.554,06	0,51614	13	19	0,55882
15	JAKARTA	12.603.659.292.534,00	2,13051	9.387.539.401.653,00	39.517.544.011.690,00	0,23755	27	24	0,70588
16	JABAR	7.439.219.287.805,21	1,66148	2.950.532.545.672,00	19.237.611.310.213,00	0,15337	23	15	0,44118
17	JATENG	5.331.681.448.798,00	1,54038	2.467.814.628.973,00	13.343.358.327.576,00	0,18495	21	21	0,61765
18	DIY	1.359.412.719.965,86	0,89458	957.561.850.914,00	2.583.056.763.524,01	0,37071	16	17	0,50000
19	JATIM	6.669.212.088.648,31	1,73624	3.092.884.299.095,00	17.372.768.543.850,90	0,17803	9	17	0,50000
21	BALI	1.783.150.435.945,86	1,41882	980.714.799.525,00	4.109.377.804.800,09	0,23865	14	14	0,41176
22	NTB	1.674.502.438.966,96	0,51248	1.075.004.985.595,00	2.379.555.590.300,46	0,45177	6	18	0,52941
23	KALBAR	2.015.541.057.785,30	0,66850	1.382.042.462.642,00	3.262.314.099.069,14	0,42364	8	17	0,50000
25	SULUT	1.340.268.106.211,97	0,58964	1.029.845.493.904,00	2.062.083.087.023,00	0,49942	54	19	0,55882
26	SULTENG	1.504.839.107.335,60	0,44006	1.160.797.526.883,00	2.132.935.005.205,50	0,54423	15	22	0,64706
27	SULSEL	2.796.269.411.249,21	0,91552	1.422.165.818.457,00	4.867.592.611.712,80	0,29217	21	17	0,50000
28	SULTRA	1.825.575.796.858,87	0,28202	1.160.895.854.568,00	1.972.559.892.627,96	0,58852	17	18	0,52941
29	GORONTALO	854.995.837.088,27	0,25101	722.098.488.898,00	1.052.555.928.696,13	0,68604	12	16	0,47059
30	SULBAR	963.032.169.235,00	0,16005	772.106.137.666,00	1.073.860.194.722,00	0,71900	27	17	0,50000
31	KALSEL	2.140.663.535.282,95	1,16893	1.505.123.319.103,00	4.350.810.456.952,25	0,34594	6	17	0,50000
33	KALTIM	5.968.037.678.703,51	0,98613	5.335.759.149.747,00	11.631.697.051.829,80	0,45873	21	21	0,61765

### Data 6 Variabel Penelitian pada Tahun Pelaporan 2014

KODE	PEMERINTAH PROVINSI (1 PRINT)	PAD	KEKAYAAN (Natural log PAD)	ASET	UKURAN (Natural log Aset)	PEND TRANSFER	KEWAJIBAN
1	ACEH	1.731.130.839.637,14	28,17980	20.906.506.241.211,50	30,67108	9.838.458.886.191,00	221.075.501.077,93
2	NTT	763.300.806.702,00	27,36092	6.228.497.977.949,74	29,46016	2.016.666.627.275,00	46.269.391.456,00
3	MALUT	203.059.697.909,92	26,03677	1.968.264.197.174,14	28,30817	1.254.013.359.801,00	133.438.983.715,00
4	PAPUA	944.929.691.841,00	27,57438	21.463.852.247.807,00	30,69739	9.420.883.556.686,00	26.147.033.876,00
5	PAPUABAR	306.674.697.583,22	26,44905	10.130.351.024.695,90	29,94656	5.455.673.503.923,00	132.828.413.149,00
6	SUMUT	4.416.811.865.266,62	29,11644	16.465.581.739.483,30	30,43229	3.321.429.286.013,00	2.328.579.136.579,47
7	SUMBAR	1.729.222.284.039,71	28,17869	9.684.014.728.536,24	29,90150	1.895.006.012.551,00	159.530.637.486,80
8	RIAU	3.245.087.745.089,53	28,80816	29.935.125.050.402,70	31,03005	4.887.322.146.743,00	753.888.375.649,49
9	JAMBI	1.281.239.472.808,44	27,87885	8.517.755.697.517,34	29,77317	1.882.425.324.008,00	154.868.341.572,07
10	SUMSEL	2.422.673.788.768,86	28,51589	18.257.096.675.399,00	30,53557	3.809.213.539.367,65	1.365.110.113.463,87
11	BENGGKULU	672.064.468.248,82	27,23362	3.283.774.150.891,79	28,82001	1.311.790.979.017,00	38.490.382.362,20
12	LAMPUNG	2.274.685.572.912,86	28,45286	6.109.073.617.493,28	29,44080	1.472.486.568.518,00	578.268.132.113,09
13	BABEL	563.108.840.861,42	27,05674	4.358.687.025.014,85	29,10319	1.156.665.582.595,00	91.260.272.553,28
14	KEPRIAU	3.245.087.745.089,53	28,80816	29.935.125.050.402,70	31,03005	4.887.322.146.743,00	753.888.375.649,49
15	JAKARTA	31.274.215.885.719,00	31,07382	425.353.600.919.701,00	33,68394	12.160.469.922.272,00	577.594.425.006,00
16	JABAR	15.038.153.309.919,00	30,34161	28.614.139.178.798,00	30,98492	7.250.566.866.517,00	495.858.371.515,29
17	JATENG	9.916.358.231.432,00	29,92521	25.057.414.797.937,60	30,85219	5.210.592.932.680,00	438.546.807.320,29
18	DIY	1.464.604.954.200,16	28,01261	7.085.704.720.674,56	29,58910	1.666.443.974.080,00	3.015.804.812,53
19	JATIM	14.442.216.534.958,90	30,30118	25.914.348.383.925,00	30,88582	6.284.788.710.312,00	699.706.177.673,73
21	BALI	2.920.416.697.074,56	28,70275	6.413.739.380.985,85	29,48946	1.647.611.927.002,47	307.410.922.064,75
22	NTB	1.115.060.397.173,45	27,73993	11.963.681.039.484,80	30,11290	1.672.366.844.641,00	102.626.124.389,23
23	KALBAR	1.621.610.890.848,66	28,11444	5.626.886.849.281,49	29,35858	2.092.103.740.022,00	214.843.308.084,00
24	KALTENG	1.253.708.122.296,09	27,85713	10.237.049.599.816,90	29,95703	1.562.083.561.094,00	120.222.197.695,52
25	SULUT	937.681.926.708,00	27,56668	4.576.695.729.099,16	29,15200	1.383.128.855.889,00	136.518.849.199,75
26	SULTENG	824.611.352.385,31	27,43818	4.914.468.007.761,47	29,22320	1.602.664.068.597,00	57.154.533.898,60
27	SULSEL	3.029.122.238.495,78	28,73929	7.945.615.814.350,41	29,70364	2.464.148.133.299,00	790.654.842.598,74
28	SULTRA	599.942.751.257,23	27,12010	7.383.457.550.987,49	29,63026	1.549.728.926.741,00	329.881.704.821,58
29	GORONTALO	281.920.210.038,54	26,36489	2.028.958.052.928,39	28,33854	926.615.334.591,00	18.517.173.336,27
30	SULBAR	223.704.907.218,29	26,13359	1.344.418.195.971,31	27,92698	1.016.145.639.254,00	35.830.044.897,00
31	KALSEL	2.898.704.954.479,94	28,69529	10.728.332.295.263,30	30,00391	1.858.359.631.211,00	372.454.056.066,27
32	MALUKU	425.425.607.781,12	26,77636	5.142.900.347.644,74	29,26864	1.397.385.764.932,00	155.995.428.056,56
33	KALTIM	6.663.113.274.491,13	29,52761	30.089.700.173.299,00	31,03520	4.253.320.982.625,00	913.791.245.661,67

KODE	PEMERINTAH PROVINSI	Pend transfer + tot kewajiban	KEMANDIRIA N {PAD/(Pend transfer + tot kewajiban)}	DANA PERIMBANGAN	TOT PENDAPATAN	INTERGOVERN MENTAL (Dana perimbangan/Tot pendapatan)		TOTAL PENGUNGKA PAN	RASIO PENGUNGKAPAN
1	ACEH	10.059.534.387.268,90	0,17209	2.551.683.310.691,00	11.606.324.715.015,30	0,21985	24	20	0,58824
2	NTT	2.062.936.018.731,00	0,37001	1.282.745.347.275,00	2.787.513.320.677,00	0,46018	13	13	0,38235
3	MALUT	1.387.452.343.516,00	0,14635	1.254.013.359.801,00	1.508.577.672.596,92	0,83126	18	16	0,47059
4	PAPUA	9.447.030.590.562,00	0,10002	2.643.812.996.686,00	10.709.818.949.527,00	0,24686	25	13	0,38235
5	PAPUABAR	5.588.501.917.072,00	0,05488	2.783.645.234.923,00	5.762.348.201.506,22	0,48307	8	10	0,29412
6	SUMUT	5.650.008.422.592,47	0,78174	1.812.638.981.079,00	7.772.029.153.270,62	0,23323	20	18	0,52941
7	SUMBAR	2.054.536.650.037,80	0,84166	1.333.059.018.233,00	3.635.837.760.819,71	0,36664	9	17	0,50000
8	RIAU	5.641.210.522.392,49	0,57525	4.231.808.633.743,00	8.132.409.891.832,53	0,52036	49	24	0,70588
9	JAMBI	2.037.293.665.580,07	0,62889	1.514.518.389.008,00	3.165.055.792.535,44	0,47851	19	18	0,52941
10	SUMSEL	5.174.323.652.831,52	0,46821	2.982.866.000.798,00	6.252.136.312.520,51	0,47710	23	21	0,61765
11	BENKULU	1.350.281.361.379,20	0,49772	1.104.582.675.517,00	1.986.238.994.265,82	0,55612	15	21	0,61765
12	LAMPUNG	2.050.754.700.631,09	1,10919	1.472.486.568.518,00	4.526.532.292.008,86	0,32530	20	23	0,67647
13	BABEL	1.247.925.855.148,28	0,45124	1.025.142.797.595,00	1.710.774.423.456,42	0,59923	17	28	0,82353
14	KEPRIAU	5.641.210.522.392,49	0,57525	4.231.808.633.743,00	8.132.409.891.832,53	0,52036	11	19	0,55882
15	JAKARTA	12.738.064.347.278,00	2,45518	9.677.533.225.272,00	43.824.300.560.665,00	0,22083	26	27	0,79412
16	JABAR	7.746.425.238.032,29	1,94130	3.260.505.636.017,00	22.310.953.031.230,00	0,14614	23	19	0,55882
17	JATENG	5.649.139.740.000,29	1,75537	2.542.626.744.680,00	15.157.460.004.461,00	0,16775	33	19	0,55882
18	DIY	1.669.459.778.892,53	0,87729	1.013.811.389.590,00	3.139.871.880.417,16	0,32288	10	18	0,52941
19	JATIM	6.984.494.887.985,73	2,06775	3.485.336.767.166,00	20.772.483.892.730,90	0,16779	16	18	0,52941
21	BALI	1.955.022.849.067,22	1,49380	1.018.431.008.887,00	4.577.678.390.572,03	0,22248	9	12	0,35294
22	NTB	1.774.992.969.030,23	0,62821	1.212.086.447.141,00	2.789.427.241.814,45	0,43453	4	20	0,58824
23	KALBAR	2.306.947.048.106,00	0,70293	1.531.868.902.983,00	3.719.770.110.973,66	0,41182	7	19	0,55882
24	KALTENG	1.682.305.758.789,52	0,74523	1.557.416.499.094,00	3.129.694.746.217,76	0,49763	6	16	0,47059
25	SULUT	1.519.647.705.088,75	0,61704	1.093.949.317.889,00	2.320.810.782.597,00	0,47137	27	24	0,70588
26	SULTENG	1.659.818.602.495,60	0,49681	1.239.776.947.097,00	2.440.226.816.031,31	0,50806	11	22	0,64706
27	SULSEL	3.254.802.975.897,74	0,93066	1.531.386.240.824,00	5.503.161.406.065,78	0,27827	15	20	0,58824
28	SULTRA	1.879.610.631.562,58	0,31918	1.236.016.579.241,00	2.189.559.757.998,23	0,56450	11	19	0,55882
29	GORONTALO	945.132.507.927,27	0,29829	800.313.828.654,00	1.209.049.489.262,54	0,66194	9	16	0,47059
30	SULBAR	1.051.975.684.151,00	0,21265	857.098.934.754,00	1.240.241.991.207,29	0,69107	8	17	0,50000
31	KALSEL	2.230.813.687.277,27	1,29939	1.523.714.615.711,00	4.793.164.631.015,94	0,31789	4	17	0,50000
32	MALUKU	1.553.381.192.988,56	0,27387	1.165.471.923.932,00	1.823.030.022.713,12	0,63930	17	21	0,61765
33	KALTIM	5.167.112.228.286,67	1,28952	4.253.320.982.625,00	11.285.828.192.021,10	0,37687	10	18	0,52941

## Lampiran 5

### Hasil Checklist per Tahun Pelaporan LKPD Provinsi

#### Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2012 (Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)

No	Pemerintah Provinsi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ACEH	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
2	NTT	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
6	SUMUT	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
7	SUMBAR	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
9	JAMBI	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
10	SUMSEL	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
11	BENGKULU	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
12	LAMPUNG	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
13	BABEL	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
14	KEPRIAU	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
15	JAKARTA	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
16	JABAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
17	JATENG	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
18	DIY	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
19	JATIM	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
20	BANTEN	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
21	BALI	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
22	NTB	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
23	KALBAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
25	SULUT	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
26	SULTENG	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
27	SULSEL	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
28	SULTRA	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
29	GORONTALO	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
30	SULBAR	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
31	KALSEL	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
33	KALTIM	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
	PERSENTASE (%)	100	81	89	100	100	0	41	37	100	100	70	0	15	89	96	22	11
	PEMDA MENGUNGKAPKAN	27	22	24	27	27	0	11	10	27	27	19	0	4	24	26	6	3
	PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN	0	5	3	0	0	27	16	17	0	0	8	27	23	3	1	21	24

**Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2012  
(Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)**

No	Pemerintah Provinsi	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	ACEH	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	NTT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	SUMUT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	SUMBAR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	JAMBI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
10	SUMSEL	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	BENGKULU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
12	LAMPUNG	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
13	BABEL	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
14	KEPRIAU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
15	JAKARTA	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
16	JABAR	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
17	JATENG	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
18	DIY	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	JATIM	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
20	BANTEN	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
21	BALI	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
22	NTB	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
23	KALBAR	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
25	SULUT	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
26	SULTENG	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
27	SULSEL	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
28	SULTRA	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
29	GORONTALO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	SULBAR	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KALSEL	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
33	KALTIM	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1
	<b>PERSENTASE (%)</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>93</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>	<b>22</b>	<b>11</b>
	<b>PEMDA MENGUNGKAPKAN</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
	<b>PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

**Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2013  
(Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)**

No	Pemerintah Provinsi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ACEH	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
2	NTT	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
4	PAPUA	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
5	PAPUABAR	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
6	SUMUT	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
7	SUMBAR	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
8	RIAU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
9	JAMBI	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
10	SUMSEL	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
11	BENGKULU	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
12	LAMPUNG	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
13	BABEL	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
14	KEPRIAU	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
15	JAKARTA	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
16	JABAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
17	JATENG	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
18	DIY	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
19	JATIM	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
21	BALI	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
22	NTB	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
23	KALBAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
25	SULUT	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
26	SULTENG	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
27	SULSEL	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
28	SULTRA	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
29	GORONTALO	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
30	SULBAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
31	KALSEL	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
33	KALTIM	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
PERSENTASE (%)		97	79	90	100	100	34	28	28	100	100	79	14	17	100	100	14	14
PEMDA MENGUNGKAPKAN		28	23	26	29	29	10	8	8	29	29	23	4	5	29	29	4	4
PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN		1	6	3	0	0	19	21	21	0	0	6	25	24	0	0	25	25



**Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2013  
(Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)**

No	Pemerintah Provinsi	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	ACEH	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
2	NTT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
4	PAPUA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
5	PAPUABAR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMUT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	SUMBAR	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
8	RIAU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
9	JAMBI	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
10	SUMSEL	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	BENGKULU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
12	LAMPUNG	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13	BABEL	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
14	KEPRIAU	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
15	JAKARTA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
16	JABAR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JATENG	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	DIY	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	JATIM	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
21	BALI	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
22	NTB	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
23	KALBAR	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
25	SULUT	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
26	SULTENG	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27	SULSEL	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	SULTRA	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
29	GORONTALO	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
30	SULBAR	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KALSEL	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
33	KALTIM	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>14</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
<b>PEMDA MENGUNGKAPKAN</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN</b>		<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>26</b>

**Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2014  
(Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)**

No	Pemerintah Provinsi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ACEH	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
2	NTT	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
3	MALUT	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
4	PAPUA	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5	PAPUABAR	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMUT	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
7	SUMBAR	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
8	RIAU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
9	JAMBI	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
10	SUMSEL	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
11	BENGKULU	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
12	LAMPUNG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
13	BABEL	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
14	KEPRIAU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
15	JAKARTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
16	JABAR	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
17	JATENG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
18	DIY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
19	JATIM	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
21	BALI	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
22	NTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
23	KALBAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
24	KALTENG	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
25	SULUT	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
26	SULTENG	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
27	SULSEL	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
28	SULTRA	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
29	GORONTALO	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
30	SULBAR	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
31	KALSEL	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
32	MALUKU	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
33	KALTIM	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
PERSENTASE (%)		94	66	78	100	100	50	50	38	88	100	81	22	22	84	84	16	25
PEMDA MENGUNGKAPKAN		30	21	25	32	32	16	16	12	28	32	26	7	7	27	27	5	8
PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN		2	11	7	0	0	16	16	20	4	0	6	25	25	5	5	27	24

**Hasil Checklist 34 Item Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia Tahun 2014 (Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010)**

No	Pemerintah Provinsi	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	ACEH	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
2	NTT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
3	MALUT	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4	PAPUA	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	PAPUABAR	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	SUMUT	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
7	SUMBAR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	RIAU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
9	JAMBI	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	SUMSEL	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
11	BENGKULU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
12	LAMPUNG	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
13	BABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
14	KEPRIAU	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
15	JAKARTA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	JABAR	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
17	JATENG	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
18	DIY	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	JATIM	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
21	BALI	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
23	KALBAR	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
24	KALTENG	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
25	SULUT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	SULTENG	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27	SULSEL	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
28	SULTRA	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
29	GORONTALO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30	SULBAR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	KALSEL	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
32	MALUKU	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
33	KALTIM	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>84</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>9,4</b>	<b>6,3</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
<b>PEMDA MENGUNGKAPKAN</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
<b>PEMDA TIDAK MENGUNGKAPKAN</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>18</b>

## Lampiran 6

### Rata-rata Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD Provinsi di Indonesia pada Tahun Pelaporan 2012-2014

#### Descriptive Statistics

Dependent Variable: DISCLO

PEM PROV	Periode	Mean	Std. Deviation	N
ACEH	2012	,6764700	.	1
	2013	,5882400	.	1
	2014	,5882400	.	1
	Total	,6176500	,05093961	3
NTT	2012	,5000000	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,3823500	.	1
	Total	,4607833	,06792526	3
MALUT	2014	,4705900	.	1
	Total	,4705900	.	1
PAPUA	2013	,5000000	.	1
	2014	,3823500	.	1
	Total	,4411750	,08319111	2
PAPUABAR	2013	,3529400	.	1
	2014	,2941200	.	1
	Total	,3235300	,04159202	2
SUMUT	2012	,5294100	.	1
	2013	,5294100	.	1
	2014	,5294100	.	1
	Total	,5294100	,00000000	3
SUMBAR	2012	,5294100	.	1
	2013	,3823500	.	1
	2014	,5000000	.	1
	Total	,4705867	,07781722	3
RIAU	2013	,7058800	.	1
	2014	,7058800	.	1
	Total	,7058800	,00000000	2
JAMBI	2012	,4117600	.	1
	2013	,4705900	.	1
	2014	,5294100	.	1
	Total	,4705867	,05882500	3
SUMSEL	2012	,4411800	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,6176500	.	1
	Total	,5196100	,08985449	3

PEM PROV	Periode	Mean	Std. Deviation	N
BENGKULU	2012	,5588200	.	1
	2013	,5588200	.	1
	2014	,6176500	.	1
	Total	,5784300	,03396552	3
LAMPUNG	2012	,5882400	.	1
	2013	,4411800	.	1
	2014	,6764700	.	1
	Total	,5686300	,11886446	3
BABEL	2012	,6470600	.	1
	2013	,6176500	.	1
	2014	,8235300	.	1
	Total	,6960800	,11135019	3
KEPRIAU	2012	,4117600	.	1
	2013	,5588200	.	1
	2014	,5588200	.	1
	Total	,5098000	,08490513	3
JAKARTA	2012	,5588200	.	1
	2013	,7058800	.	1
	2014	,7941200	.	1
	Total	,6862733	,11886900	3
JABAR	2012	,4705900	.	1
	2013	,4411800	.	1
	2014	,5588200	.	1
	Total	,4901967	,06122180	3
JATENG	2012	,5588200	.	1
	2013	,6176500	.	1
	2014	,5588200	.	1
	Total	,5784300	,03396552	3
DIY	2012	,5000000	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5294100	.	1
	Total	,5098033	,01697987	3
JATIM	2012	,5000000	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5294100	.	1
	Total	,5098033	,01697987	3
BANTEN	2012	,4117600	.	1
	Total	,4117600	.	1
BALI	2012	,3823500	.	1
	2013	,4117600	.	1
	2014	,3529400	.	1
	Total	,3823500	,02941000	3
NTB	2012	,5000000	.	1

PEM PROV	Periode	Mean	Std. Deviation	N
	2013	,5294100	.	1
	2014	,5882400	.	1
	Total	,5392167	,04492997	3
KALBAR	2012	,4705900	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5588200	.	1
	Total	,5098033	,04492452	3
KALTENG	2014	,4705900	.	1
	Total	,4705900	.	1
SULUT	2012	,5588200	.	1
	2013	,5588200	.	1
	2014	,7058800	.	1
	Total	,6078400	,08490513	3
SULTENG	2012	,4705900	.	1
	2013	,6470600	.	1
	2014	,6470600	.	1
	Total	,5882367	,10188500	3
SULSEL	2012	,5588200	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5882400	.	1
	Total	,5490200	,04492888	3
SULTRA	2012	,5294100	.	1
	2013	,5294100	.	1
	2014	,5588200	.	1
	Total	,5392133	,01697987	3
GORONTALO	2012	,3823500	.	1
	2013	,4705900	.	1
	2014	,4705900	.	1
	Total	,4411767	,05094539	3
SULBAR	2012	,3235300	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5000000	.	1
	Total	,4411767	,10188500	3
KALSEL	2012	,4705900	.	1
	2013	,5000000	.	1
	2014	,5000000	.	1
	Total	,4901967	,01697987	3
MALUKU	2014	,6176500	.	1
	Total	,6176500	.	1
KALTIM	2012	,5000000	.	1
	2013	,6176500	.	1
	2014	,5294100	.	1
	Total	,5490200	,06122740	3

PEMPROV	Periode	Mean	Std. Deviation	N
Total	2012	,4978204	,08072349	27
	2013	,5253548	,08492553	29
	2014	,5542278	,11576073	32
	Total	,5274060	,09788349	88

**Lampiran 7**  
**Output SPSS**

**1. Uji Statistik Deskriptif Variabel Dependen**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
DISCLO	,5274060	,09788349	88
WEALTH	27,97800	1,32149626	88
ASSETS	29,87776	1,10098514	88
INDEPN	,7534953	,54372168	88
IRGOVM	,4163988	,16240370	88
FIND	17,69	9,703	88

**2. Uji Statistik Deskriptif Variabel Independen**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
DISCLO	,5274060	,09788349	88
WEALTH	27,97800	1,32149626	88
ASSETS	29,87776	1,10098514	88
INDEPN	,7534953	,54372168	88
IRGOVM	,4163988	,16240370	88
FIND	17,69	9,703	88

**3. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08718333
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,061
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,779
Asymp. Sig. (2-tailed)		,578

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



#### 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.981	,441		-2,225	,029		
	WEALTH	,014	,019	,183	,711	,479	,146	6,860
	ASSETS	,033	,015	,375	2,159	,034	,321	3,115
	INDEPN	,005	,037	,027	,132	,895	,224	4,473
	IRGOVM	,218	,091	,361	2,386	,019	,422	2,372
	FIND	,002	,001	,221	2,214	,030	,974	1,026

a. Dependent Variable: DISCLO

#### 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,057	,284		,202	,840		
	WEALTH	-.007	,012	-,152	-,536	,593	,146	6,860
	ASSETS	,006	,010	,115	,602	,549	,321	3,115
	INDEPN	-.006	,024	-,059	-,258	,797	,224	4,473
	IRGOVM	,029	,059	,083	,496	,621	,422	2,372
	FIND	,000	,001	,059	,538	,592	,974	1,026

a. Dependent Variable: ABS\_RES\_1

#### 6. Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,455 <sup>a</sup>	,207	,158	,08980203	1,796

a. Predictors: (Constant), FIND, WEALTH, IRGOVM, ASSETS, INDEPN

b. Dependent Variable: DISCLO

#### 7. Uji Simultan (Statistik F)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,172	5	,034	4,273	,002 <sup>a</sup>
	Residual	,661	82	,008		
	Total	,834	87			

a. Predictors: (Constant), FIND, WEALTH, IRGOVM, ASSETS, INDEPN

b. Dependent Variable: DISCLO

## 8. Uji Parsial (Uji Statistik t) dan Koefisien Regresi

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,981	,441		-2,225	,029		
	WEALTH	,014	,019	,183	,711	,479	,146	6,860
	ASSETS	,033	,015	,375	2,159	,034	,321	3,115
	INDEPN	,005	,037	,027	,132	,895	,224	4,473
	IRGOVM	,218	,091	,361	2,386	,019	,422	2,372
	FIND	,002	,001	,221	2,214	,030	,974	1,026

a. Dependent Variable: DISCLO